

**ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
(KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**AGUS WINARENDRA  
NIM. 12020110141042**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Agus Winarendra

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141042

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI  
(KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA  
TENGAH TAHUN 2008-2012)**

Dosen Pembimbing : Dr. Nugroho SBM, MSP.

Semarang, 25 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Nugroho SBM, MSP)  
NIP. 19610506 198703 1002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Agus Winarendra  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141042  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI  
(KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA  
TENGAH TAHUN 2008-2012)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 16 September 2014**

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
2. Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si. (.....)
3. Fitri Arianti, SE., M.Si (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.com. Ph.D. Akt

NIP 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agus Winarendra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (KASUS : 35 KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Agustus 2014  
Yang membuat pernyataan,

(Agus Winarendra)  
NIM : 12020110141042

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Seorang pelajar yang cerdas adalah ia yang mencari ilmu dengan kegigihan dan kesabaran”*

*“Dalam proses belajar jangan jadikan nilai sebagai parameter. Kecerdasan seseorang tidak bisa dinilai dengan angka-angka yang mampu memastikan kesuksesan, tingkat kedewasaan, dan keteguhan seseorang”*

*“Jadikanlah pribadianmu yang bermanfaat bagi sesama”*

Skripsi ini kupersembahkan pada Ayahanda, Ibunda, dan Semua Pihak  
Yang Telah Memberikan Motivasi Dalam Penyelesaian Skripsi

## **ABSTRACT**

*Poverty is a complex problem that is multidimensional and can hinder the process of economic development in Indonesia, including in Central Java. This research purpose to analyze the effect of economic growth, low education, higher education, level of pain, capital credit against poverty level 35 districts/ cities in Central Java during the period 2008 to 2012.*

*The methods used in this research is panel data with approach fixed effect and the dummy area. The use dummy regions in this research purpose to look at the variation conditions of poverty in 35 districts/cities in Central Java during the period 2008 to 2012. This research use secondary data.*

*The results of this research indicate that the education higher and capital credit influential negative and significant statistically ( $\alpha = 5$  percent) against poverty level. While low education influential positive and statistically significant ( $\alpha = 5$  percent) against poverty level. Meanwhile economic growth and level of pain have no effect against poverty level.*

***Keywords : Poverty level , economic growth, low education, higher education, Level of pain, capital credit, and a panel of data***

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi kondisi kemiskinan 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dan kredit modal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik ( $\alpha = 5$  persen) terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pendidikan rendah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik ( $\alpha = 5$  persen) terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesakitan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci : Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal, dan data panel**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (KASUS : 35 KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012)**”, tak lepas dari doa dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menghaturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda terima kasih telah memberikan kasih sayang, arahan serta doa-doa yang tiada henti bagi penulis, serta adikku (Arif Wibowo) yang telah membuat hidup penulis lebih berwarna.
2. Pakde Santoso terima kasih telah bersedia mengarahkan dan memimbing penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.
3. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



4. Hastarini Dwi Atmati, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen yang telah membagikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Dr. Nugroho SBM, MSP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan IESP 2010, Abdil Haq Fasolatain, Margareta Damanik, Ferry Rahmadhani, Cintami Rahmawati, Rini Asmita Samosir, Pradipta Eka, Diniar Rahmawati, Muhammad Lukman, Ika Dita Septiana, Hendi Adi Saputra, Rahmat Andi Yulianto, Wahyu Anisa Miftofani, Janwar Hardi Halim, Eko Suryanto, Asri Prastiko Wibowo, Rizki Yanuar Pratiwi, Aris Caesar Kurnia Jaya, Irawan Ari Kusuma, Yohanes Adeo, Dewi Utami Setyaningrum, Vivi Cristovani, Novia Hesti Aryuna, Ayu Triani Utami, Gerry Bramesta Anas. Eka Nur Supiati, Yohan Maladzi Putra, Jarot Setya Ridha Tama, Herlan Baskoro, Nasuha Zen, Bayu Aji Prakoso, Fauzani Zamzami, Hanggoro Setya Prayogo, Alfian Wahyu Fauzan, Veby Reza Pradana, Indra Permana, Erfan Satrio Nugroho, Taufiq Catur Priambodo, Uray Muhammad Taufan, Saut Parluhutan Hutahaeon,

Silvera Sekar Wijayanti, Manik Dhaniswara, Khoirul Huda, Fani Firmanto, Robby Roddliya, Umadatur Husna, Bondan Satro, Dwijaya Samuda Suryaman terima kasih atas kebersamaan selama ini yang kita lalui selama duduk dibangku perkuliahan.

8. Veby Reza Pradana, Aris Caesar Kurnia Jaya, dan Indra Permana terima kasih telah memberikan cerita hidup yang berkesan bagi penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
9. Janwar Hardi Halim terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam mempelajari ekonometrika.
10. Teman-teman KKN Desa Somoketro Muhammad Faisal Affandi, Nur Hidayati, Urni Nurani Subarma, Prima Danu Kusuma, Dwi Yuni Setiawati, Fernando Sirait, Bayu Winengku Nugroho, Aprillia Intan Purwanti, Dwi Wijayanti, Rahmawati Prabandan, Riyan Indra P. terima kasih atas kenangannya selama menginap di Posko Desa Somoketro.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 25 Agustus 2014

Penulis

(Agus Winarendra)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Kemiskinan.....	15
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan.....	15
2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan.....	16
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan.....	18
2.1.1.4 Ukuran Pendapatan Kemiskinan.....	21
2.1.1.5 Indikator Kemiskinan.....	21
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.1.2.1 Pengaruh pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.....	31
2.1.3 Pendidikan.....	32
2.1.3.1 Pendidikan Rendah.....	34
2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Rendah Terhadap Kemiskinan.....	35
2.1.3.3 Pendidikan Tinggi.....	36
2.1.3.4 Pengaruh Pendidikan Tinggi Terhadap Kemiskinan.....	36

2.1.4 Kesehatan.....	37
2.1.4.1 Kesakitan.....	37
2.1.4.2 Pengaruh Kesakitan Terhadap Kemiskinan.....	38
2.1.5 Kredit Modal.....	39
2.1.5.1 Kredit.....	39
2.1.5.2 Modal.....	41
2.1.5.3 Pengaruh Kredit Modal Terhadap Kemiskinan....	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	46
2.4 Hipotesis.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>49</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.4 Metode Analisis.....	52
3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel.....	55
3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Penggunaan Variabel <i>Dummy</i> .....	56
3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	60
3.4.4 Pengujian Statistik.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>66</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	66
4.1.1 Keadaan Geografis.....	66
4.1.2 Tingkat Kemiskinan.....	68
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	70
4.1.4 Pendidikan Rendah.....	72
4.1.5 Pendidikan Tinggi.....	74
4.1.6 Tingkat Kesakitan.....	76
4.1.7 Kredit Modal.....	78
4.2 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	80
4.2.1 Deteksi Multikolinearitas.....	80
4.2.2 Deteksi Autokorelasi.....	81
4.2.3 Deteksi Heteroskedastisitas.....	82
4.2.4 Deteksi Normalitas.....	83
4.3 Hasil Pengujian Statistik.....	84
4.3.1 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	84
4.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji $t$ ).....	84
4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji $F$ ).....	85
4.4 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	86
4.5 Interpretasi Hasil Estimasi Model Kemiskinan.....	89
4.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.....	89
4.5.2 Variabel <i>Dummy</i> .....	93

<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	97
5.3 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2008-2012.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	7
Tabel 1.3 Angka Kesakitan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	8
Tabel 1.4 Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	9
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Pemerintah Guna Menanggulangi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	68
Tabel 4.2 Tingkat Kemiskinan Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	69
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .....	71
Tabel 4.4 Angka Kesakitan Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	77
Tabel 4.5 Hasil Matrik korelasi Tiap Variabel Independen Model Kemiskinan.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey</i> (BG) Model Kemiskinan.....	81
Tabel 4.7 Hasil Uji White Model Kemiskinan.....	82
Tabel 4.8 <i>Dummy Effect</i> .....	87
Tabel 4.9 Estmasi Model Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.....	88
Tabel 4.10 Koefisien Variabel <i>Dummy</i> .....	95

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1976-2012.....	2
Gambar 1.2 Persebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau Di Indonesia Tahun 2012.....	4
Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	6
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.....	20
Gambar 2.2 Hubungan Antara Pembangunan Kesehatan Dan Kemiskinan.....	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 (35) Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.....	66
Gambar 4.2 Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Jenjang SD Ke bawah dan SLTP Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Jiwa).....	73
Gambar 4.3 Rata-Rata Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Jenjang SLTA+ Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Jiwa).....	75
Gambar 4.4 Rata-Rata Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja Di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)	79
Gambar 4.5 Hasil Uji <i>Jarquea-Bera</i> Model Kemiskinan.....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Mentah Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Rendah, Pendidikan Tinggi Tingkat Kesakitan, Serta Kredit Modal Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	103
Lampiran B Hasil Regresi Utama Model Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	109
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik Model Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

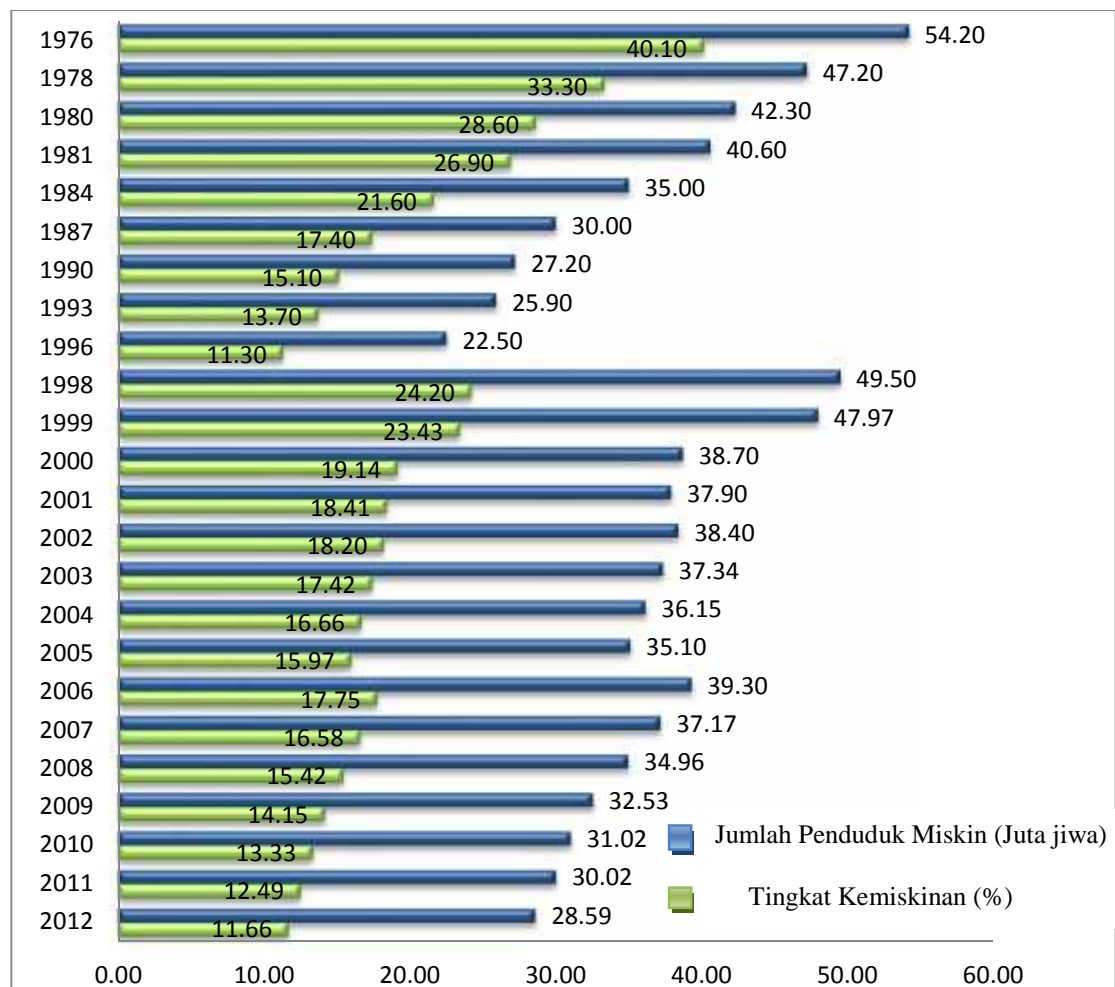
*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan pernyataan dan komitmen perserikatan bangsa-bangsa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deklarasi tersebut tertuang ke dalam 8 butir tujuan yang dicapai pada tahun 2015, meliputi (1) mengentaskan kemiskinan dan kelaparan absolut, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal, (3) meningkatkan dukungan persamaan gender dan pemberdayaan wanita, (4) menurunkan tingkat mortalitas anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) menurunkan persebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya, (7) meningkatkan keberlangsungan lingkungan, (8) mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2012).

Tujuan utama MDGs adalah komitmen mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (Todaro, 2006). Kemiskinan dapat muncul ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan dalam definisi yang luas kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beranekaragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi, miskin terhadap asset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup, miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber

keuangan dan terbatasnya informasi. Selanjutnya, dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, rendahnya penyediaan air bersih, terbatasnya perumahan layak huni, belum meratanya pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan rendah, serta dari keseluruhannya saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung (Andre Bayo Ala dalam Arsyad, 1997)

Di Indonesia, dinamika kemiskinan tiada henti mewarnai kehidupan masyarakat sejak masa orde baru hingga saat ini.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia**  
**Tahun 1976 – 2012**



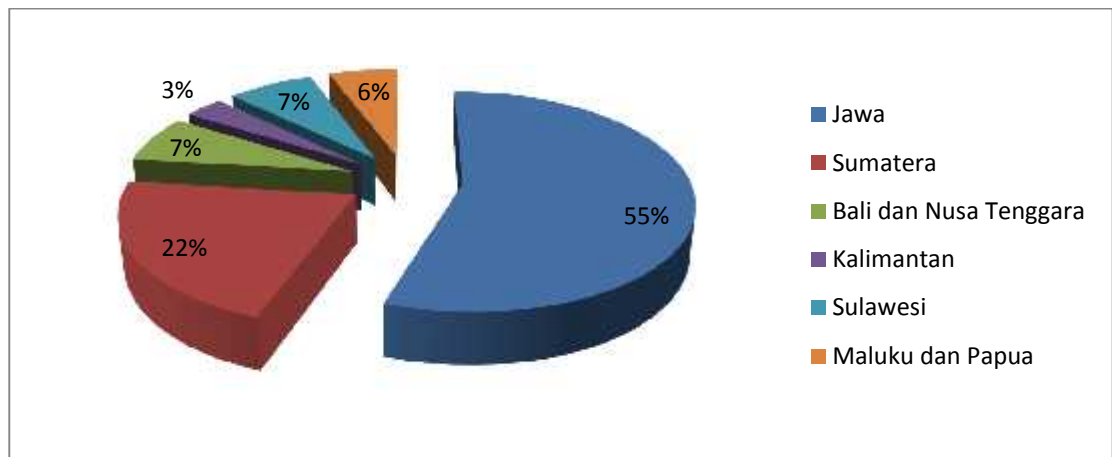
Sumber : BPS Statistik Nasional berbagai tahun, diolah

Pada masa orde baru, langkah utama pemerintah dalam memperbaiki stabilitas fundamental makroekonomi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan (Zain, 2010). Terlihat pada Gambar 1.1 tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara dramatis, yaitu pada tahun 1976 sebesar 40,10 persen menjadi 11,30 persen di tahun 1996. Namun, akibat krisis ekonomi tingkat kemiskinan mulai merangkak naik hingga menyentuh angka 24,20 persen di tahun 1998. Menurut Kemal Stamboel (2009) menyatakan bahwa krisis ekonomi 1997/1998 memberikan pesan penting bahwa stabilitas makroekonomi memang dibutuhkan tapi tidak cukup (*it's a necessary but not sufficient*), sehingga diperlukan adanya sebuah sistem Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari guncangan ekonomi.

Setelah masa krisis dilalui dan pemerintah mulai menerapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS), tingkat kemiskinan mulai berangsur-angsur turun hingga tahun 2005 menyentuh angka 15,97 persen. Akan tetapi, tingkat kemiskinan mulai menunjukkan peningkatan kembali pada tahun 2006 yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi (Tim Indonesia Bangkit, 2006), sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan sebesar 17,75 persen. Dengan semakin gencarnya pemerintah merefleksikan program-program pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu, program jaminan kesehatan masyarakat, program bantuan operasional sekolah, program kredit usaha rakyat (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2014), maka tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan secara berangsur-angsur hingga di tahun 2012 yang bertengger pada posisi 11,67 persen.

Mengingat MDGs merupakan amanat yang patut diwujudkan, maka diperlukan koordinasi dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 menyentuh angka 7,55 persen sesuai dengan salah satu indikator keberhasilan pencapaian MDGs dalam pengentasan kemiskinan.

**Gambar 1.2**  
**Persebaran Penduduk Miskin Menurut Pulau**  
**Di Indonesia Tahun 2012**



*Sumber: BPS Statistik Nasional tahun 2012, diolah*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa persebaran penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan proporsi sebesar 55 persen. Hal ini mengingat Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ditinjau secara administratif, Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten. Selanjutnya apabila melihat 5 tahun terakhir, rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,92 persen.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi Di Pulau Jawa**  
**Tahun 2008 – 2012**

Provinsi	Tingkat Kemiskinan					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
DKI Jakarta	4,29	3,62	3,48	3,75	3,69	3,76
Jawa Barat	13,01	11,96	11,27	10,65	10,09	11,39
<b>Jawa Tengah</b>	<b>19,23</b>	<b>17,72</b>	<b>16,56</b>	<b>15,76</b>	<b>15,34</b>	<b>16,92</b>
DI Yogyakarta	18,32	17,23	16,83	16,08	16,05	16,90
Jawa Timur	18,51	16,68	15,26	14,23	13,40	15,62
Banten	8,15	7,64	7,16	6,32	5,85	7,02

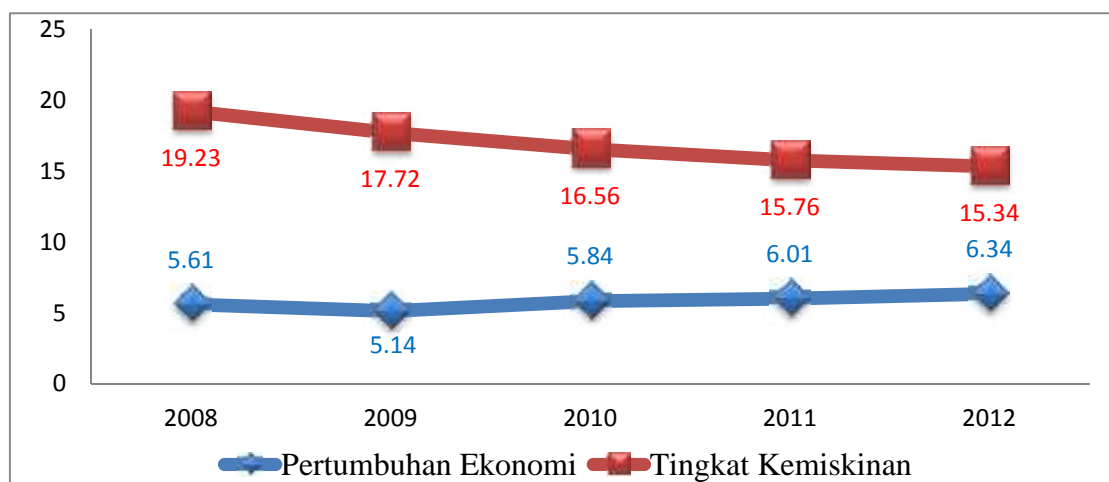
*Sumber : BPS Statististik Nasional berbagai tahun*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2008 hingga 2012 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 15,34 persen di tahun 2012. Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong *hard core* (>10 persen), yang mengindikasikan belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan serangkaian kebijakan guna mengentaskan kemiskinan. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu diketahui faktor-faktor yang berkontribusi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi seringkali digadang-gadang merupakan faktor yang dibutuhkan guna mereduksi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pernyataan ini turut didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 2006) yang menyatakan bahwa adanya suatu relasi negatif (*trade-off*) yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terjadi selama periode tahun 2008 hingga 2012, turut diikuti dengan semakin kecilnya angka kemiskinan selama kurun waktu 2008 sampai 2012.

**Gambar 1.3**  
**Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 – 2012**



Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun, diolah

Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ditentukan tingkat pendidikan, baik pendidikan rendah maupun tinggi keduanya merupakan faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Melalui investasi pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat terbentuk, apakah mencetak sumber daya manusia yang tergolong rendah atau berkualitas, keduanya dapat tercerminkan dari tingkat produktivitas. Apabila disokong dengan pendidikan rendah maka berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan pada akhirnya terjadi penurunan taraf hidup, namun dengan ditunjang pendidikan tinggi maka mampu meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang**  
**Ditamatkan Di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012**

Tahun	SD ke bawah (Jiwa)	SLTP (Jiwa)	SLTA + (Jiwa)
2008	9 367 374	2 798 160	3 298 124
2009	9 457 640	2 893 843	3 483 899
2010	9 173 558	2 993 593	3 642 296
2011	9 135 874	3 048 208	3 732 053
2012	9 013 849	3 061 738	4 057 303

*Sumber :BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk kerja di Jawa Tengah didominasi pendidikan terakhir SD ke bawah. Selama kurun waktu 2008 hingga 2012 jumlah kumulatif penduduk kerja tamatan SD ke bawah dan SLTP mengalami fluktuasi dengan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah cenderung mengalami penurunan yaitu sebanyak 9.367.374 jiwa di tahun 2008 menjadi 9.013.849 jiwa di tahun 2012, sedangkan tenaga kerja tamatan SLTP mengalami peningkatan, jika ditahun 2008 sebanyak 2.798.160 jiwa maka pada tahun 2012 sebanyak 3.061.738 jiwa. Di lain pihak, jumlah penduduk kerja tamatan pendidikan SLTA ke atas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 4.057.303 jiwa di tahun 2012, dari yang semula 3.298.124 jiwa di tahun 2008.

Rendahnya produktivitas yang salah satunya disebabkan tingkat kesakitan yang semakin memburuk, turut andil dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Kondisi kesehatan yang semakin buruk berdampak pada lembahnya fisik yang selanjutnya berimplikasi pada penurunan kapasitas kerja dan akhirnya berujung pada rendahnya pendapatan yang diperoleh.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa angka kesakitan masyarakat Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur sejak tahun 2008 hingga 2012 yaitu, sebesar 59,7 persen di tahun 2008 menjadi 47,4 persen di tahun 2012.

**Tabel 1.3**  
**Angka Kesakitan Di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012**

Tahun	Angka Kesakitan ( % )
2008	59,7
2009	50,9
2010	50,5
2011	48,3
2012	47,4

*Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun*

Faktor lain yang diklaim mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah kredit modal. Apabila meneropong keberhasilan konsep *Grameen Bank* yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus pada pertengahan 1970-an, memberikan bukti konkrit bahwa melalui pemberian kredit yang ditujukan kepada kaum miskin, mampu mentransformasikan simbol kemiskinan menjadi simbol harapan menuju kesejahteraan (Todaro,2006).



Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2008 sampai 2012, jumlah kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas penggunaan modal kerja mengalami peningkatan, yaitu sebesar 28.738.234 juta rupiah di tahun 2008, menjadi 43.668.152 juta rupiah di tahun 2012.

**Tabel 1.4**  
**Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012**

Tahun	Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Atas Penggunaan Modal Kerja (Juta Rupiah)
2008	28.738.234
2009	31.179.408
2010	35.893.711
2011	37.305.817
2012	43.668.152

*Sumber : Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah) berbagai tahun*

Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kredit modal terhadap kemiskinan, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, serta variabel pendidikan berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dicky Wahyudi (2013) menghasilkan penelitian bahwa variabel pendidikan serta kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Di samping itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah, dkk (2014) yang mengemukakan bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan faktor-faktor yang diyakini mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan meliputi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, serta kredit modal. Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **Analisis Tingkat Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kasus : 35 Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Selama 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 15,34 persen di tahun 2012. Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa masih tergolong *hard core* (> 10 persen) yang besar kemungkinan akan memperlambat proses pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Ironisnya, Bappeda telah menargetkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menyentuh angka 8,75 persen pada tahun 2015 guna mensinergikan MDGs.

Penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, diindikasikan merupakan derivasi dari kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir di Jawa Tengah.

Modal manusia merupakan komponen penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan seiring meningkatnya pendidikan dan kesehatan. Selama beberapa tahun terakhir di Jawa Tengah, jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir SD ke bawah dan SLTP mengalami fluktuatif, namun di lain pihak penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir SLTA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di samping itu, derajat kesehatan menunjukkan ke arah yang positif yang dicerminkan dengan semakin menurunnya angka kesakitan selama beberapa tahun terakhir.

Kredit modal diyakini merupakan cara efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Selama beberapa tahun terakhir kredit UMKM atas penggunaan modal kerja di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan rendah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan tinggi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kesakitan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan rendah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan tinggi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh tingkat kesakitan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, kredit modal secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah wawasan para pembaca dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan para pengambil kebijakan guna mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, serta kredit modal di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Selain itu bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan landasan teori tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kesehatan, kesakitan, kredit, dan modal. Di samping itu, pada bab ini juga tertera penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu kondisi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tingkat kesakitan, serta kredit modal di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2008 – 2012. Selain itu dipaparkan hasil analisis penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini dipaparkan literatur yang meliputi beberapa teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.

#### **2.1 Landasan Teori**

Di dalam landasan teori akan dikupas beberapa teori yang relevan dengan penelitian yaitu, teori kemiskinan, teori pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, teori pendidikan, teori pendidikan rendah dan pengaruh pendidikan rendah terhadap kemiskinan, teori pendidikan tinggi dan pengaruh pendidikan tinggi terhadap kemiskinan, teori kesehatan, teori kesakitan dan pengaruh kesakitan terhadap kemiskinan, teori kredit, teori modal serta pengaruh kredit modal terhadap kemiskinan.

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **2.1.1.1 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar minimum (Kuncoro, 2006). Hal senada turut diutarakan Todaro (2006) yang mengemukakan bahwa cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya guna mempermudah gambaran mengenai hak-hak dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, maka Bappenas (dalam Setiawan, 2011)

memaparkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan,
2. Kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan**

1. Kemiskinan berdasarkan tingkatan kelompok, terbagi menjadi 3

(Setiawan, 2011) :

- a. *Destitute*, merupakan kelompok yang paling miskin atau fakir miskin sehingga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali, serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- b. *Poor Group*, merupakan kelompok miskin yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan tetapi secara relatif masih memiliki sumber pendapatan dan memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- c. *Near Poor*, merupakan kelompok hampir miskin, sehingga kelompok ini rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi dan sosial yang dapat menggeser mereka dari status rentan menjadi miskin bahkan fakir miskin bila tidak terdapat bantuan sosial.



2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD, 2011) menggolongkan kemiskinan ke dalam 3 derajat yang berbeda :
  - a. *Potential Poverty*, yaitu seseorang yang memiliki pendapatan berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga sedikit guncangan eksternal akan menyebabkan masuk ke dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk.
  - b. *Transient Poverty*, adalah kemiskinan yang terjadi hanya untuk waktu yang relatif sementara akibat kondisi eksternal tertentu, dan dimungkinkan dapat dengan mudah terbebas dari situasi miskin jika kondisi berubah ke arah yang lebih positif.
  - c. *Chronis Poverty*, kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus atau lebih bersifat permanen akibat kultur kemiskinan (*fatalisme*) atau tempat tinggal yang tidak menguntungkan serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal.
3. Menurut Chriswardani Suryawati (2005), kemiskinan berdasarkan sifatnya di bagi menjadi 2 :
  - a. *Natural Poverty*, adalah kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
  - b. *Artifical Poverty*, merupakan kemiskinan yang lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang

membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

### 2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

1. Menurut Spicker (dalam Wahyudi, 2013) penyebab kemiskinan dapat di bagi 4 mazhab yang berbeda :

- a. *Individual explanation*, kemiskinan dalam terminology karakteristik orang miskin itu sendiri yaitu, hasil dari kemalasan, kekurangan perorangan atau beberapa macam kekurangan atau kecacatan, seseorang miskin karena membuat kesalahan pilihan, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal untuk bekerja dan sebagainya.
- b. *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana terdapat warisan pada generasi selanjunya sehingga terjadi ketidakberuntungan yang berulang terus ke generasi selanjutnya, baik dalam warisan asuhan dan pendidikan.
- c. *Subcultural explanation*, kemiskinan karena pola perilaku, tapi lebih disebabkan oleh keadaan pada pilihan personal.
- d. *Structural explanations*, mengidentifikasi kemiskinan sebagai hasil dari masyarakat di tempat tersebut. Kemiskinan menciptakan suatu kesenjangan yang diintrepestasikan oleh adanya divisi sosial, kelas, status atau kekuatan.

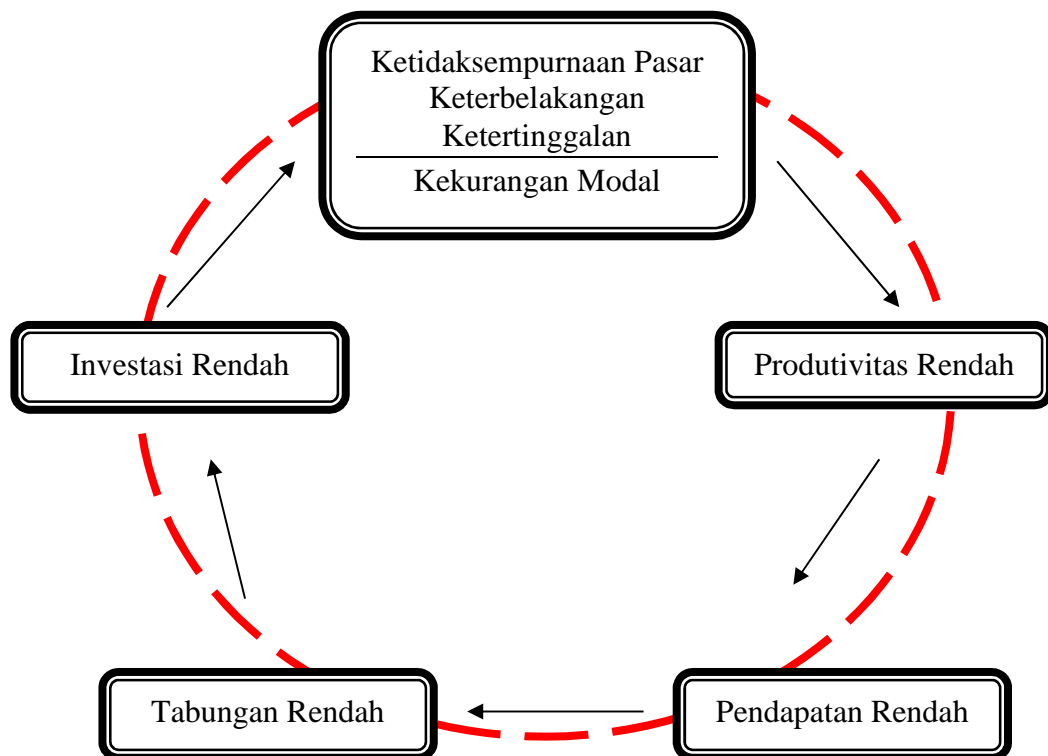
2. Menurut *World Bank* 2003 (dalam Sholeh 2009), penyebab dasar kemiskinan adalah :

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
  - b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
  - c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
  - d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
  - e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
  - f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
  - g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
  - h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
  - i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
3. Kemudian Sharp, *et al* (dalam Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi :
- a. secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
  - b. kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.

- c. kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga faktor penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh Sharp, et al bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Nurkse mengatakan bahwa “ *a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**



*Sumber: Kuncoro (2006)*

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006)

#### **2.1.1.4 Ukuran Pendapatan Kemiskinan**

Menurut Arsyad (1997) secara umum kemiskinan dapat dilihat dari 2 ukuran pendapatan :

1. Kemiskinan Absolut adalah seseorang yang memiliki pendapatan, namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum agar hidup secara layak. Kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.
2. Kemiskinan Relatif adalah seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Sehingga kemiskinan relatif bersifat dinamis dan kemiskinan akan selalu ada.

#### **2.1.1.5 Indikator Kemiskinan**

*World Bank* membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing Power Parity*/ paritas daya beli) per hari.

*United Nations Development Programme (UNDP)* dalam laporannya pada *Human Development Report (HDP)* 1997, memperkenalkan ukuran kemiskinan dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*) yang diukur dalam 3 hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun), pendidikan dasar diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf, serta keseluruhan ketetapan ekonomi (*economic provisioning*) yang diukur dengan melihat persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan. Apabila angka HPI semakin rendah maka menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan semakin baik, dan turut pula sebaliknya (Todaro, 2006).

Di samping itu (Todaro dalam Prasetyo, 2010) terdapat ukuran kemiskinan menurut *Foster-Greer-Thorbecker* yang dihitung dengan rumus :

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \frac{Y_p - Y_i}{Y_p} \quad (2.1)$$

Keterangan :

$$= 0, 1, 2$$

$Y_p$  = Garis kemiskinan

$Y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang

Berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, 3, \dots, q$ )  $Y_i < Y_p$

$H$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$N$  = Jumlah penduduk

Jika :

- $= 0$ , maka diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- $= 1$ , maka diperoleh *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ), yaitu indeks kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- $= 2$ , maka diperoleh *Poverty Severity* ( $P_2$ ), yaitu indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selain itu, terdapat beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia antara lain yaitu,

1. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat kemiskinan dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Oleh karena itu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulan di bawah Garis Kemiskinan di masukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.

2. Sayogyo mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita yang terbagi 2 wilayah (Suryawati, 2005) :

1) Daerah Pedesaan, dengan kriteria :

- a. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Sangat miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Melarat, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

2) Daerah Perkotaan, dengan kriteria :

- a. Miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- b. Sangat miskin, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Melarat, apabila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.



3. Menurut Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ukuran kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang terbagi menjadi 5 tahap (Soleh, 2009) :

- a. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), apabila belum mampu memenuhi salah satu indikator yang ditetapkan BKKBN.
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin), apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 6 ketentuan BKKBN.
- c. Keluarga Sejahtera II, apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 14 ketentuan BKKBN.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III, apabila baru mampu memenuhi indikator 1 s.d 19 ketentuan BKKBN.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, apabila sudah mampu memenuhi indikator keseluruhan (1 s.d 21) ketentuan BKKBN.

Indikator- indikator ketentuan BKKBN :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik,
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan,
5. Bila pasangan subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;

6. Semua anak umur 7 – 15 tahun dalam keluarga bersekolah;
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/ telur,
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah;
11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing;
12. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
13. Seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin;
14. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi;
15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;

18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv;
20. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, *institusional* (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznets dalam Todaro, 2006). Selanjutnya diikuti Sukirno (2011) yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal (*capital accumulation*), termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja. Akumulasi modal dapat diperoleh apabila sebagian pendapatan yang diterima saat ini dan dialokasikan untuk

ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa depan.

2. Angkatan kerja, apabila angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif, dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik.
3. Kemajuan teknologi (*technological progress*), diartikan sebagai metode baru untuk meningkatkan output serta mencapai tingkat efisiensi. Kemajuan teknologi diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu,
  - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, dapat terjadi bila tingkat output yang lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor yang sama.
  - b. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, ditandai dengan dengan meningkatnya secara tepat teknologi dalam menjalankan proses produksi, sehingga kontribusi tenaga kerja cenderung lebih rendah.
  - c. Kemajuan teknologi yang hemat modal, merupakan fenomena yang relatif langka terjadi khususnya di negara maju, yang lebih tujuannya untuk menghemat tenaga kerja bukan modal. Namun di negara berkembang, kemajuan teknologi yang hemat modal adalah hal yang paling mereka

butuhkan, hal ini mengingat masih tingginya angka pengangguran di negara berkembang (Todaro, 2006).

Menurut Nugraheni, pengukuran kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain (Prasetyo, 2010) :

- a. Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat nasional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang bersifat global, dan bukan merupakan tolok ukur pertumbuhan ekonomi secara tepat, karena belum mampu mencerminkan kesejahteraan tiap penduduknya. Selanjutnya, guna mengetahui dinamika laju PDB atau PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang terjadi tiap satu waktu tertentu (satu tahun), maka dapat dihitung dengan rumus :

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \quad (2.2)$$

Keterangan :

$G_t$  = Pertumbuhan PDB / PDRB dalam satuan persen

$Y_t$  = PDB / PDRB pada tahun t

$Y_{t-1}$  = PDB/PDRB pada tahun t – 1

- b. Produk Domestik Bruto Per kapita atau di tingkat nasional Produk Domestik Regional Bruto Per kapita merupakan skala daerah yang digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih

baik, dikarenakan lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara yang dicerminkan oleh pendapatan rata-rata tiap yang diperoleh tiap individu. Selanjutnya, guna mengetahui dinamika laju PDB Per kapita atau PDRB Per kapita yang terjadi tiap satu waktu tertentu (satu tahun), maka dapat dihitung dengan rumus :

$$GPK_t = \frac{Y \text{ per kapita } t - Y \text{ per kapita } t-1}{Y \text{ per kapita } t-1} \times \quad (2.3)$$

Keterangan :

$GPK_t$  =Pertumbuhan PDB / PDRB per kapita dalam satuan persen

$YK_t$  =PDB / PDRB per kapita pada tahun t

$YK_{t-1}$ =PDB/PDRB per kapita pada tahun t – 1

Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung nilai PDRB, yaitu :

- a) Menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran meliputi (konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), serta ekspor netto (ekspor dikurangi impor) yang dihasilkan dalam perekonomian.
- b) Menggunakan pendekatan produksi, dengan pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.

- c) Menggunakan pendekatan pendapatan, dengan pendekatan ini pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian kewirausahaan) yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional (Sukirno,2011).

### **2.1.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Mengacu pada teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa, berawal dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Tambunan, 2011).

Selain itu, terdapat pula beberapa empiris yang membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain :

1. Wongdemiswati (2009) yang menunjukkan penelitian bahwa semakin impresif pertumbuhan ekonomi maka berdampak pada mereduksinya tingkat kemiskinan yang ada.
2. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) yang menghasilkan penelitian bahwa adanya *trade-off* yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin.
3. Sumarto (dalam Kuncoro, 2006) yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat hubungan yang negatif sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi.

### 2.1.3 Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat 3 jalur pendidikan yang diterapkan Indonesia, yaitu :

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang Pendidikan formal :
  - a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.



- b) Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau berbentuk lain yang sederajat.
  - c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang merupakan program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

3. Pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### **2.1.3.1 Pendidikan Rendah**

Umumnya kualitas sumber daya manusia di negara-negara sedang berkembang masih tergolong rendah yang dicerminkan dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah (Suryana, 2000). Menurut Sukirno (dalam Suryana, 2000) terdapat beberapa faktor yang menimbulkan tingkat mutu pendidikan di negara-negara sedang berkembang rendah, antara lain:

1. Mutu pendidikan yang rendah disebabkan karena kekurangan biaya yang dapat disediakan untuk itu.
2. Kurangnya buku teks yang sesuai dengan kepentingan dan keadaan negara-negara yang bersangkutan. Umumnya mereka menggunakan buku teks yang digunakan dari negara-negara barat yang mempunyai dasar analisis serta struktur yang sukar dipraktikkan bagi kepentingan kehidupannya sehari-hari.
3. Kurangnya fasilitas-fasilitas dan gaji yang relatif rendah mengurangi gairah para pengajar untuk memberikan pengajaran kepada para pelajar dan para mahasiswa dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, masalah ketidaksesuaian corak pendidikan negara sedang berkembang yang lebih menekankan pada keterlibatan langsung dalam kegiatan

pertanian guna menunjang pembangunan desa, maka Philip H.Coombs (dalam Suryana, 2000) membagi tipologi pendidikan yang sesuai untuk negara berkembang antara lain :

- 1) Pendidikan umum atau pendidikan dasar, baca tulis, hitung dan pengetahuan elementer tentang sains dan lingkungan hidup yang oleh kebanyakan sekolah dasar dan menengah yang ingin dicapai.
- 2) Pendidikan kesejahteraan keluarga dimaksudkan terutama untuk mendalami pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga, termasuk kesehatan dan nutrisi, rumah sehat dan perawatan anak, membangun rumah dan perbaikannya, keluarga berencana dan yang serupa.
- 3) Pendidikan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik lokal maupun nasional, koperasi, proyek-proyek kemasyarakatan dan yang serupa.
- 4) Pendidikan ketrampilan kerja, dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan khusus yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan.

### **2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Rendah Terhadap Kemiskinan**

Menurut Ansel M. Sharp, salah satu penyebab kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan rendah berimplikasi pada produktivitas yang rendah, sehingga diikuti pula rendahnya pendapatan yang diperoleh (Setiawan,2011).

### **2.1.3.3 Pendidikan Tinggi**

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi (Suryana, 2000). Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi peranan pendidikan tinggi dalam membangun perekonomian antara lain :

1. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pengetahuan pemikiran mereka.
2. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan dapat menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Dengan demikian tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno dalam Suryana, 2000).

### **2.1.3.4 Pengaruh Pendidikan Tinggi Terhadap Kemiskinan**

Melalui investasi pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan bersedia memberikan upah yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi mampu memperoleh kesejahteraan lebih baik (Sitepu, 2010).

### **2.1.4 Kesehatan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya Santoso (2006) mengungkapkan bahwa kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan di mana tidak dialami penyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan di mana cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalangan terbatas.

Todaro (2006) mengemukakan 3 alasan penting peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan :

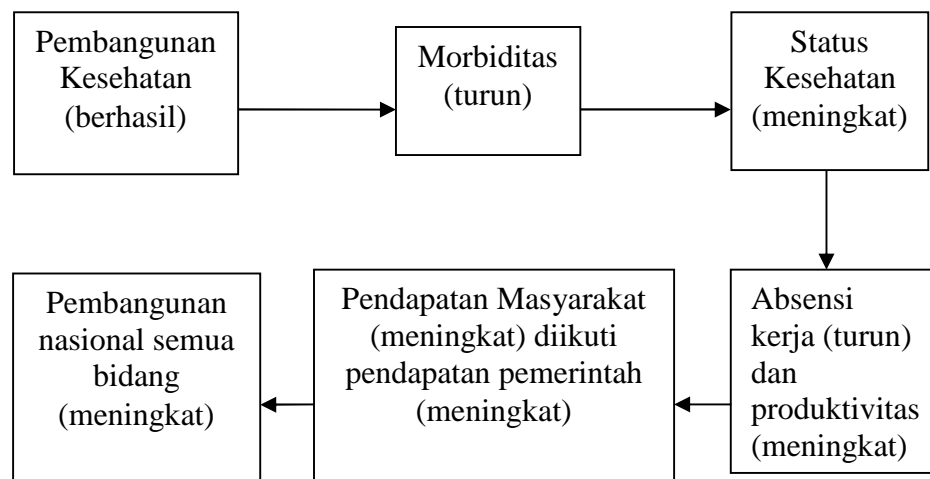
1. Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kali kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan.
2. Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mengabaikan eksternalitas (seperti masalah penularan penyakit).
3. Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan, dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, karena kegagalan pasar.

#### **2.1.4.1 Kesakitan**

Kesakitan dapat diartikan sebagai keluhan kesehatan yang dialami seseorang hingga terganggu aktifitasnya sehari-hari. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (BPS, 2013)

Gambar 2.3 memaparkan bahwa apabila pembangunan kesehatan berhasil, maka status kesehatan akan mengalami peningkatan, yang dicerminkan menurunnya angka morbiditas, dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Seiring peningkatan produktivitas maka berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti pula pendapatan pemerintah. Akhirnya berujung pada peningkatan pembangunan nasional di seluruh bidang.

**Gambar 2.3**  
**Hubungan Antara Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi**



*Sumber : Chriswardani Suryawati (2005), diolah*

#### **2.1.4.2 Pengaruh Kesakitan Terhadap Kemiskinan**

Kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi (Todaro, 2006). Selanjutnya, Nurkse menambahkan pula bahwa, kesehatan yang semakin buruk akan mengakibatkan lemahnya fisik yang selanjutnya menurunkan kapasitas kerjanya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh turut rendah (Jhingan, 1983).

## 2.1.5 Kredit Modal

### 2.1.5.1 Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit kepada debitur dapat terlaksana apabila debitur memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu (Sanusi, 2011),

1. *Character*, merupakan gambaran kepribadian dari calon debitur yang dilihat dari sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan latar belakang keluarga maupun hobinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.
2. *Capacity*, merupakan penilaian calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban pembayaran kredit, yang dapat diukur melalui pengalaman mengelola usaha serta sejarah perusahaan yang pernah dikelola.
3. *Capital*, merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola debitur, yang mana dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan serta ratio keuntungan.

4. *Condition of economy*, merupakan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon usaha debitur, yang mana erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.
5. *Collateral*, merupakan jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya

Menurut (Budisantoso dan Triandaru, 2006) terdapat beberapa jenis kredit atas dasar tujuan penggunaannya, antara lain :

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), merupakan kredit jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas 2 macam, yaitu :
  - a) *KMK-Revolving*, merupakan kredit yang dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.
  - b) *KMK-Einmaleg*, merupakan kredit yang hanya diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, dan apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK berkelanjutan, maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru.



- b. Kredit Investasi (KI), merupakan kredit berjangka menengah atau panjang, yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang guna kegiatan usaha nasabah.
- c. Kredit Konsumsi, merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

#### **2.1.5.2 Modal**

Menurut kamus bahasa Indonesia modal merupakan uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Modal adalah seluruh asset yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan output guna memperoleh pendapatan Selanjutnya, macam - macam modal yaitu (Yusuf, 2010) :

1. Modal menurut pemilikinya
  - a. Modal perseorangan, artinya modal tersebut dimiliki orang perseorangan
  - b. Modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak
2. Modal menurut wujudnya
  - a. Konkret, artinya modal yang jelas wujudnya serta dapat dilihat
  - b. Abstrak, artinya modal yang tidak terlihat namun dapat dirasakan kegunaannya
3. Modal menurut bentuknya

- a. Uang, artinya modal berupa dana
  - b. Barang, artinya modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi
4. Modal menurut sifatnya
- a. Modal tetap, artinya modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi
  - b. Modal lancar, artinya modal yang habis dalam satu kali proses produksi
5. Modal menurut sumbernya
- a. Modal sendiri, artinya modal yang berasal dari pemilik perusahaan
  - b. Modal pinjaman, artinya modal pinjaman dari pihak lain

### **2.1.5.3 Pengaruh Kredit Modal Terhadap Kemiskinan**

Kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk melakukan kegiatan usaha. Akibatnya produktivitasnya rendah dan berdampak pada rendahnya pendapatan. Selanjutnya berimplikasi pada ketidakmampuan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah dan akhirnya mengakibatkan kekurangan modal. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil guna menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal (Setiawan, 2011). Hal senada turut diutarakan Yunus (dalam Todaro, 2006) yang mengatakan bahwa lemahnya akses untuk mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kredit modal, serta kemiskinan yang diteliti dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

1. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel. Model yang digunakan adalah  $POVERTY = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 POPULASI + \beta_3 AGRISHARE + \beta_4 INDUSTRISHARE + \beta_5 INFLASI + \beta_6 SMP + \beta_7 SMA + \beta_8 DIPLM + \beta_9 DUMMYKRISIS + \epsilon$ , dimana POVERTY adalah jumlah penduduk miskin yang diduga dipengaruhi oleh pendapatan (PDRB), jumlah populasi penduduk (POPULASI), pangsa sektor pertanian dalam PDRB (AGRISHARE), pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB (INDUSTRISHARE), tingkat inflasi (INFLASI), jumlah lulusan sekolah setingkat SMP (SMP), jumlah lulusan sekolah setingkat SMA (SMA), jumlah lulusan sekolah setingkat diploma (DIPLM), dan dummy krisis ekonomi (DUMMY KRISIS). Hasil penelitian ini adalah PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh tersebut relatif tidak besar. Variabel inflasi dan populasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun berpengaruh relatif kecil. Variabel Share sektor pertanian dan share sektor industri berpengaruh signifikan mengurangi jumlah kemiskinan. Variabel yang signifikan dan relatif

paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan ialah pendidikan yang memiliki pola hubungan negatif.

2. Dicky Wahyudi (2013) dalam jurnal “Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah”, menggunakan metode perhitungan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Model persamaan yang digunakan adalah  $K_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 H_{it} + \alpha_2 E_{it} + \alpha_3 GE_{it} + \alpha_4 G_{it} + \alpha_5 U_{it} + \alpha_6 D_{1+} + \alpha_7 D_{2+} + \alpha_8 D_{3+} + \alpha_9 D_{4+} + \alpha_{10} D_{5+} + \alpha_{11} D_{6+} + \alpha_{12} D_{7+} + \alpha_{13} D_{8+} + \alpha_{14} D_{9+} + \alpha_{15} D_{10+} + \alpha_{16} D_{11+} + \alpha_{17} D_{12+} + \alpha_{18} D_{13+} + \alpha_{19} D_{14+} + \alpha_{20} D_{15+} + \alpha_{21} D_{16+} + \alpha_{22} D_{17+} + \alpha_{23} D_{18+} + \alpha_{24} D_{19+} + \alpha_{25} D_{20+} + \alpha_{26} D_{21+} + \alpha_{27} D_{22+} + \alpha_{28} D_{23+} + \alpha_{29} D_{24+} + \alpha_{30} D_{25+} + \alpha_{31} D_{26+} + \alpha_{32} D_{27+} + \alpha_{33} D_{28+} + \alpha_{34} D_{29+} + \alpha_{35} D_{30+} + \alpha_{36} D_{31+} + \alpha_{37} D_{32+} + \alpha_{38} D_{33+} + \alpha_{39} D_{34+} + \epsilon_{it}$ ,  
Dimana K adalah kemiskinan, H adalah kesehatan, GE adalah pengeluaran pemerintah, G adalah pertumbuhan ekonomi, U adalah pengangguran,  $D_1$ - $D_{34}$  adalah dummy kabupaten/kota Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah variabel kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Inayah, dkk (2014), dalam jurnal “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal” yang menggunakan desain penelitian kausal dan memasukkan variabel dependen yaitu jumlah kredit modal kerja dan variabel independen adalah pendapatan bersih. Hasil dalam penelitian ini adalah kredit modal kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 82,4 persen.

Selanjutnya ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

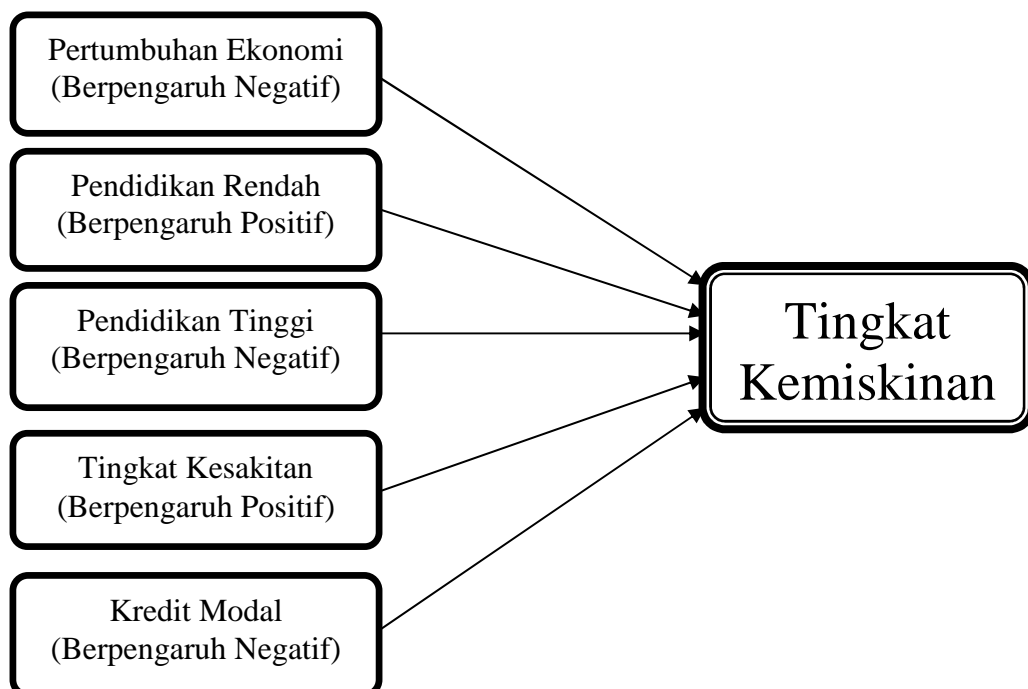
**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Dependen/ Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	'Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin'' oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	Variabel dependen: kemiskinan  Variabel independen: PDRB, share sektor pertanian, share sektor industri, pendidikan	Berdasarkan hasil penelitian seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
2	''Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah'' oleh Dicky Wahyudi (2013)	Variabel dependen: kemiskinan  Variabel independen: pendidikan, kesehatan ,pengeluaran pemerintah, pengangguran, pertumbuhan ekonomi	Pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah, serta pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
3	''Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal'' oleh Inayah, dkk (2014)	Variabel dependen : kredit modal kerja  Variabel independen: pendapatan bersih	Berdasarkan hasil penelitian kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. Guna memudahkan dalam memahami penelitian yang dimaksudkan, maka selanjutnya akan ditampilkan gambar kerangka pemikiran secara sistematis :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan (*trade-off*) negatif dengan kemiskinan. Mengacu pada teori *trickle down effect*, yang menjelaskan bahwa, berawal dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Tambunan, 2011)

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dikarenakan tingkat pendidikan rendah, maka berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah, dan pada gilirannya pendapatan yang diperoleh turut rendah (M. Sharp Et. Al dalam Setiawan, 2011). Sedangkan melalui investasi tingkat pendidikan yang tinggi, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dari tingkat produktivitas yang tinggi, dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan yang lebih baik (Rasidin, 2010).

Kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi (Todaro, 2006). Selanjutnya, Nurkse menambahkan pula bahwa, kesehatan yang semakin buruk akan mengakibatkan lemahnya fisik yang selanjutnya menurunkan kapasitas kerjanya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh turut rendah (Jhingan, 1983).

Selanjutnya, kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk kegiatan usaha. Akibatnya produktivitas rendah dan berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu salah satu langkah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal (Setiawan, 2011). Selanjutnya hal yang senada turut diutarakan Yunus (dalam Todaro, 2006) yang mengatakan bahwa lemahnya akses untuk mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka.

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu pada teori yang diutarakan para tokoh-tokoh ekonom, maka hipotesis yang dapat diambil peneliti :

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Diduga variabel pendidikan rendah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Diduga variabel pendidikan tinggi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Diduga variabel tingkat kesakitan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Diduga variabel kredit modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat 2 tipe variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau di jelaskan oleh variabel independen (bebas). Sedangkan variabel independen dijelaskan sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan terhadap variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (KMS), sedangkan yang dipilih menjadi variabel independen adalah pertumbuhan ekonomi (PEK), pendidikan rendah (PDR), pendidikan tinggi (PDT), tingkat kesakitan (KST), serta kredit modal (KDM). Selanjutnya akan dipaparkan definisi dan indikator tiap variabel dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan (KMS), merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi (PEK), dinyatakan dalam laju Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan persen.

3. Pendidikan Rendah (PDR), dalam penelitian ini dinyatakan dalam jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SD ke bawah dan SLTP tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan jiwa.
4. Pendidikan Tinggi (PDT), dalam penelitian ini dinyatakan dalam jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SLTA ke atas tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan jiwa.
5. Tingkat Kesakitan (KST), dalam penelitian ini dinyatakan dalam angka kesakitan yang didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari (BPS,2013) tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan persen.
6. Kredit Modal (KDM), dalam penelitian ini kredit modal dinyatakan dalam kredit usaha mikro, kecil dan menengah atas penggunaan modal kerja tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data yang digunakan dalam satuan juta rupiah.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) selama periode tahun 2008 - 2012 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Selanjutnya akan dipaparkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah tahun 2012.
2. Data pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2012.
3. Data jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SD ke bawah dan SLTP tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2009 hingga 2013.
4. Data jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir jenjang SLTA ke atas tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2009 hingga 2013.
5. Data tingkat kesakitan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah 2012.
6. Data kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atas penggunaan modal kerja tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah diperoleh dari Bank

Indonesia dalam terbitan Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah tahun 2010 vol 12 dan tahun 2012 vol 12.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengambil data-data yang telah dipublikasikan dari lembaga-lembaga terpercaya yang memiliki keterkaitan tujuan yang sama dalam pelaksanaan penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode data panel serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi eviews 6. Analisis dengan menggunakan data panel merupakan kombinasi antara deret waktu *time series* dan deret lintang *cross section* (Gujarati, 2010). Model persamaan data *time series* ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_t + \mu_t ; t = 1,2,\dots,T \quad (3.1)$$

Di mana T adalah banyaknya data *time series*

Sedangkan model persamaan data *cross section* ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \mu_i ; i = 1,2, \dots,N \quad (3.2)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{it} + \mu_{it} \\ t = 1, 2, \dots, T ; \text{ dan } i = 1, 2, \dots, N \quad (3.3)$$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Menurut Wibisono (dalam Shocrul dan Rahmat, 2011) pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan :

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Data panel menghasilkan hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam analisis model data panel, terdapat dua macam pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahyudi, 2013) :

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi *intersep* dan *slope* yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV)
2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*), keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat di atasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model acak (*random effect*).

Menurut Judge (dalam Wahyudi, 2013) terdapat 4 pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

- a. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM)
- b. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
- c. Apabila komponen *error*  $\epsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
- d. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

### 3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, kesehatan, kredit modal terhadap tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data *time series* selama periode tahun 2008 sampai 2012 dan data *cross section* sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 175 observasi. Fungsi persamaan model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

$$\mathbf{KMS}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{PEK}_{it} + \beta_2 \mathbf{PDR}_{it} + \beta_3 \mathbf{PDT}_{it} + \beta_4 \mathbf{KST}_{it} + \beta_5 \mathbf{KDM}_{it} + \mu_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan :

KMS = Tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

PEK = Pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

PDR = Pendidikan rendah tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

PDT = Pendidikan tinggi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

KST = Tingkat Kesakitan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

KDM = Kredit modal tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1 - \beta_5$  = koefisien regresi variabel independen

$\mu_{it}$  = *Error Term*

$i$  = *cross-section*

$t$  = *time series*

### 3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Penggunaan Variabel

#### *Dummy*

Menurut Gujarati (dalam Wahyudi, 2013) menyatakan bahwa estimasi model regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* dapat terpenuhi apabila memenuhi beberapa asumsi tersebut, antara lain :

- a. Intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan ruang. Sedangkan *error term* mencerminkan perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi antar individu.



- c. Koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi untuk setiap individu dan waktu.
- d. Semua koefisien (baik intersep maupun koefisien slope) bervariasi untuk setiap individu.
- e. Intersep dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu.

Berdasarkan asumsi ke 2 yang diutarakan Gujarati tentang koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu, maka menguatkan peneliti dalam menganalisis tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi (kasus : 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012) untuk menggunakan pendekatan *Fixed Effect*. Penelitian ini mengasumsikan intersep tiap individu (kabupaten/kota) memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep tiap individu. Oleh karena itu, persamaan dalam penelitian ini sering disebut dengan istilah *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Berkaitan dengan penggunaan persamaan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), maka penelitian ini membutuhkan satu wilayah yang menjadi wilayah acuan (*benchmark*). Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan kota Semarang menjadi wilayah acuan yang dikarenakan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah dibandingkan wilayah (kabupaten/kota) lain di Jawa Tengah. Maka model persamaan dengan *Least Square Dummy Variabel* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\mathbf{KMS}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \mathbf{PEK} + \beta_2 \mathbf{PDR} + \beta_3 \mathbf{PDT} + \beta_4 \mathbf{KST} + \beta_5 \mathbf{KMD} + \beta_6 \mathbf{D}_0 + \beta_7 \mathbf{D}_1 + \beta_8 \mathbf{D}_2 + \beta_9 \mathbf{D}_3 + \beta_{10} \mathbf{D}_4 + \beta_{11} \mathbf{D}_5 + \beta_{12} \mathbf{D}_6 + \beta_{13} \mathbf{D}_7 + \beta_{14} \mathbf{D}_8 + \beta_{15} \mathbf{D}_9 + \beta_{16} \mathbf{D}_{10} + \beta_{17} \mathbf{D}_{11} + \beta_{18} \mathbf{D}_{12} + \beta_{19} \mathbf{D}_{13} + \beta_{20} \mathbf{D}_{14} + \beta_{21} \mathbf{D}_{15} + \beta_{22} \mathbf{D}_{16} + \beta_{23} \mathbf{D}_{17} + \beta_{24} \mathbf{D}_{18} + \beta_{25} \mathbf{D}_{19} + \beta_{26} \mathbf{D}_{20} + \beta_{27} \mathbf{D}_{21} + \beta_{28} \mathbf{D}_{22} + \beta_{29} \mathbf{D}_{23} + \beta_{30} \mathbf{D}_{24} + \beta_{31} \mathbf{D}_{25} + \beta_{32} \mathbf{D}_{26} + \beta_{33} \mathbf{D}_{27} + \beta_{34} \mathbf{D}_{28} + \beta_{35} \mathbf{D}_{29} + \beta_{36} \mathbf{D}_{30} + \beta_{37} \mathbf{D}_{31} + \beta_{38} \mathbf{D}_{32} + \beta_{39} \mathbf{D}_{33} + \beta_{40} \mathbf{D}_{34} + \mu_{it}
\end{aligned}
\tag{3.5}$$

Keterangan :

- $\mathbf{KMS}$  = Tingkat Kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{PEK}$  = Pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{PDR}$  = Pendidikan rendah tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{PDT}$  = Pendidikan tinggi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{KST}$  = Tingkat Kesakitan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{KMD}$  = Kredit modal tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah
- $\mathbf{D}_0$  = Dummy Kota Semarang (*Benchmark*)
- $\mathbf{D}_1$  = Dummy Kabupaten Cilacap
- $\mathbf{D}_2$  = Dummy Kabupaten Banyumas
- $\mathbf{D}_3$  = Dummy Kabupaten Purbalingga
- $\mathbf{D}_4$  = Dummy Kabupaten Banjarnegara
- $\mathbf{D}_5$  = Dummy Kabupaten Sragen
- $\mathbf{D}_6$  = Dummy Kabupaten Purworejo
- $\mathbf{D}_7$  = Dummy Kabupaten Wonosobo
- $\mathbf{D}_8$  = Dummy Kabupaten Magelang
- $\mathbf{D}_9$  = Dummy Kabupaten Boyolali

- D<sub>10</sub> = Dummy Kabupaten Kebumen
- D<sub>11</sub> = Dummy Kabupaten Sukoharjo
- D<sub>12</sub> = Dummy Kabupaten Wonogiri
- D<sub>13</sub> = Dummy Kabupaten Karanganyar
- D<sub>14</sub> = Dummy Kabupaten Kudus
- D<sub>15</sub> = Dummy Kabupaten Grobogan
- D<sub>16</sub> = Dummy Kabupaten Blora
- D<sub>17</sub> = Dummy Kabupaten Temanggung
- D<sub>18</sub> = Dummy Kabupaten Pati
- D<sub>19</sub> = Dummy Kabupaten Klaten
- D<sub>20</sub> = Dummy Kabupaten Pemasang
- D<sub>21</sub> = Dummy Kabupaten Demak
- D<sub>22</sub> = Dummy Kabupaten Semarang
- D<sub>23</sub> = Dummy Kabupaten Rembang
- D<sub>24</sub> = Dummy Kabupaten Jepara
- D<sub>25</sub> = Dummy Kabupaten Tegal
- D<sub>26</sub> = Dummy Kabupaten Batang
- D<sub>27</sub> = Dummy Kabupaten Pekalongan
- D<sub>28</sub> = Dummy Kabupaten Brebes
- D<sub>29</sub> = Dummy Kabupaten Kendal
- D<sub>30</sub> = Dummy Kota Salatiga
- D<sub>31</sub> = Dummy Kota Magelang
- D<sub>32</sub> = Dummy Kota Surakarta

$D_{33}$  = Dummy Kota Pekalongan

$D_{34}$  = Dummy Kota Tegal

$\alpha_0$  = Intersep

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien regresi model kemiskinan

$\beta_{1-34}$  = Koefisien dummy wilayah

$\mu$  = *error term*

$i$  = *cross section*

$t$  = *time series*

### 3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estiamtor/ BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika data yang digunakan terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta ketidakdistribusian data secara normal. Adapun cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

#### a. Deteksi Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005), deteksi multikolineartias bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik dicerminkan dengan tidak adanya korelasi antara variabel bebas, namun apabila terindikasi adanya korelasi, maka variabel tersebut ortogonal, maksudnya variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Penelitian ini dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan matrik korelasi tiap variabel bebas. Apabila ditemukan korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka model kemiskinan terkena penyakit multikolinearitas.

#### **b. Deteksi Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2005), deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t - 1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Breusch-Godfrey*, yaitu membandingkan nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *Breusch-Godfrey* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit autokorelasi.

#### **c. Deteksi Heteroskedastisitas.**

Menurut Ghozali (2005) deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *White*, yaitu membandingkan nilai  $Obs * R-squared$  hasil uji *White* dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*)

tabel. Apabila nilai *Obs\*R-squared* hasil uji *White* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

#### **d. Deteksi Normalitas**

Menurut Ghozali (2005) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Jarque-Bera*, yaitu membandingkan nilai *Jarque-Bera* yang diperoleh dengan nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Jarque-Bera* lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terdistribusi secara normal.

### **3.4.4 Pengujian Statistik**

Pengujian Statistik bertujuan untuk mengukur hasil estimasi pada suatu model guna menjelaskan hasil tersebut. Adapun yang termasuk dalam pengujian statistik yaitu koefisien determinasi ( $R^2$ ), Uji Statistik t, serta Uji F.

#### **a) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat ukur untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menenrangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol sampai satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan Nilai ( $R^2$ ) yang

mendekati satu mengartikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* ( $R^2$ ), dikarenakan nilai *Adjusted* ( $R^2$ ) telah disesuaikan dengan banyaknya df (*degree of freedom*). Sehingga lebih tepat dan sesuai dengan model penelitian ini, mengingat penggunaan data panel yang mengakibatkan df menjadi besar.

#### **b) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai t statistik dengan nilai t tabel dengan penggunaan ( $\alpha = 5$  persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_1 > 0$ , terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

2.  $H_0 : \beta_2 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pendidikan rendah terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_2 > 0$ , terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik variabel pendidikan rendah terhadap variabel tingkat kemiskinan.

3.  $H_0 : \beta_3 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik variabel pendidikan tinggi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_3 > 0$ , terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel pendidikan tinggi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

4.  $H_0 : \beta_4 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat kesakitan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_4 > 0$ , terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik variabel tingkat kesakitan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

5.  $H_0 : \beta_5 = 0$ , tidak terdapat pengaruh signifikan variabel kredit modal terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta_5 > 0$ , terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara statistik variabel kredit modal terhadap variabel tingkat kemiskinan.

### c) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 1997). Dalam penelitian ini guna memastikan apakah variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, tingkat kesakitan, serta kredit modal) mampu memaksir variabel dependen (tingkat kemiskinan), maka dilakukan dengan cara membandingkan F statistik dengan F tabel dengan penggunaan ( $\alpha = 5$  persen). Sehingga dapat ditulis sebagai berikut :



1. Apabila  $F$  statistik  $>$   $F$  tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. Apabila  $F$  statistik  $<$   $F$  tabel maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.